



BULAN

JAN FEB MART APRIL MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOV DES 20.14

TANGGAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

HAL 9

▶ DANA HIBAH DAN BANSOS

Bantul Lakukan Pendataan Online

BANTUL—Pekab Bantul akan melakukan pendataan penerima hibah-bansos secara *online*. Pendataan secara *online* itu bakal dimulai tahun ini.

“Dengan sistem *online* terpantau siapa yang menerima bantuan double. Misalnya, dia sudah dapat di AP [administrasi pembangunan], tapi dapat lagi misalnya dari Dinas Pekerjaan Umum [DPU] maka akan ketahuan. Atau tahun lalu dapat sekarang dapat akan kelihatan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Riyantono, Kamis (30/1).

Mekanisme *online* itu juga sebagai solusi ihwal dugaan selama ini bahwa

hibah-bansos banyak dinikmati pihak-pihak yang menjadi kepanjangan tangan partai. “Sekaligus untuk mencegah kemungkinan bantuan digunakan untuk modal politik tadi,” katanya.

Dia mengakui segelintir orang yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima dana hibah-bansos berkali-kali adalah tokoh masyarakat setempat. Kemungkinan tokoh masyarakat ini dipercaya mendistribusikan dana hibah-bansos ke warga lainnya. Namun ia tak dapat memastikan apakah mereka merupakan kepanjangan tangan caleg atau partai.

Pegiat Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) Irwan Suryono menengarai, ratusan juta dana hibah-bansos tersebut dinikmati kepanjangan tangan partai atau caleg. Simpatisan itulah yang akan membantu caleg atau parpol mendulang suara saat Pemilu. “Karena yang dapat itu nama-nama itu saja,” ungkapnya Kamis (30/1).

Selama ini bukan rahasia lagi bila proposal hibah-bansos yang sebagian besar dicairkan Bagian Administrasi Pembangunan (AP) itu awalnya masuk melalui anggota dewan yang mayoritas maju kembali sebagai caleg.

“Kami banyak menemukan di

lapangan, hibah-bansos itu dimanfaatkan caleg, disalurkan lewat simpatisannya di lapangan untuk meraih suara. Yang menerima itu kemungkinan simpatisan-simpatian di lapangan yang sudah dipercaya. Kami curiga ke sana,” lanjut Irwan.

MTB mendesak, Pemkab Bantul membenahi mekanisme pencairan hibah-bansos serta mengecek secara teliti siapa penerima manfaat program populis itu. Anggaran hibah-bansos selama ini banyak digunakan untuk pembangunan fisik seperti perbaikan rumah pribadi atau jalan dan infrastruktur kampung. (Bhekti Suryani)

▶ MUTU BANGUNAN

Bupati Warning Kontraktor Bermasalah

BANTUL—Bupati Bantul Sri Surya Widati memberi *warning* alias peringatan kepada sejumlah kontraktor di Bantul yang menggarap proyek pembangunan fasilitas publik. Langkah itu dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY menemukan banyak fasilitas publik yang dibangun di Bantul tidak memenuhi standar keamanan.

Sri Surya Widati menyatakan telah menegur sejumlah kontraktor yang tak becus melaksanakan proyek pembangunan sesuai kontrak kesepakatan. Ia memperingatkan mereka beserta sejumlah instansi terkait bekerja sesuai aturan.

“Sudah kami tegur. Berkali-kali saya sampaikan kerja itu sesuai aturan,” tegas Ida sapaan akrabnya pekan lalu.

Namun, *punishment* yang diberikan Pemkab tak sampai pada pemutusan hubungan kerja atau memasukkan sejumlah pengembang itu dalam daftar hitam. “Sanksinya bertahap dari teguran lisan hingga tulisan. Tidak harus di-*black list*,” imbuh Ida.

Dia mengatakan, Pemkab Bantul ke depan harus berhati-hati dalam memilih rekanan. Jangan sampai kualitas bangunan yang dibuat tidak memenuhi standar dan membahayakan keselamatan banyak orang.

Sekda Bantul Riyantono mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum kini tengah

menyosialisasikan bagaimana pengerjaan bangunan sesuai standar ke pengembang, setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Baru saja ada sosialisasi kepada para jasa konstruksi. Membahas soal pelaksanaan proyek sesuai standar tadi,” terang Riyantono.

Seperti yang diberitakan media ini sebelumnya ada delapan bangunan publik di Bantul yang bermasalah dalam pembangunannya. Delapan bangunan itu di antaranya Pasar Unggas Bantul, dua bangunan milik RSUD Panembahan Senopati, dan Pasar Bantul. Pada pembangunan Pelat Lantai II Gedung Elektromedik RSUD Panembahan Senopati misalnya, sesuai kontrak kerja antara RSUD dengan rekanan menggunakan mutu beton 19,3 Mpa. Namun kenyataannya dibangun menggunakan beton dengan mutu hanya 6,10 Mpa.

Mutu sebesar itu selain tidak sesuai volume kontrak juga tak memenuhi standar keamanan sebab ambang batas mutu beton yang dapat diterima untuk pembangunan Pelat tersebut adalah di angka 16,41 Mpa.

Kondisi serupa juga terjadi di tujuh bangunan lain, dengan mutu beton di bawah ambang batas. Sementara pembangunan di empat proyek lainnya tak menggunakan mutu material sesuai kontrak yang disepakati. (Bhekti Suryani)